

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan produsen utama minyak kelapa sawit dunia yang mendominasi 52% pasar global. Salah satu negara tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit Indonesia adalah Uni Eropa yang menduduki posisi kedua setelah India. Konsumsi minyak kelapa sawit Uni Eropa pada mengalami peningkatan sebesar 3,2 per tahun atau rata-rata volumenya bertambah 190 ribu ton per tahun pada periode 2009 hingga 2016. Pemanfaatan minyak kelapa sawit di Uni Eropa ada dalaam bidang pemenuhan pangan hingga dalam pemenuhan energi. Dengan produktivitasnya yang tinggi, kehadiran minyak kelapa sawit mengurangi masalah dilemma pangan-energi (*trade-off fuel-food*) yang dihadapi Uni Eropa. Ketersediaan minyak kelapa sawit di Uni Eropa juga menciptakan manfaat ekonomi. Akibat penggunaan minyak kelapa sawit di Uni Eropa, setiap tahun terjadi peningkatan GDP sebesar 5,8 miliar Euro, menciptakan penerimaan pemerintah 2,6 miliar Euro dan menciptakan kesempatan kerja 117 ribu orang. Pemerintah Uni Eropa juga mendapat keuntungan berupa penerimaan pajak sebesar 2,6 milyar Euro.

Walaupun kehadiran minyak kelapa sawit di Uni Eropa nyatanya membawa keuntungan, tetapi minyak kelapa sawit tetap mendapatkan rintangan untuk memasuki pasar Uni Eropa. Diantaranya adalah mewajibkan kepemilikan sertifikat yang dikeluarkan oleh *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) sejak tahun 2008. Permasalahannya adalah sertifikasi RSPO ini dinilai hanya berpihak kepada negara konsumen, tidak berpihak kepada negara produsen sehingga memberatkan negara produsen untuk mendapatkan sertifikasi RSPO tersebut. Hambatan selanjutnya adalah peraturan dalam *Renewable Energy Directive* (RED) yang dikeluarkan pada 23 April 2009 dalam RED 2009/28/EC oleh Komisi Eropa yang bertujuan untuk menggantikan penggunaan bahan bakar berbasis fosil dengan bahan bakar yang berasal dari energi yang dapat diperbaharui guna mengurangi emisi kendaraan yang mengandung karbon dioksida (CO₂) yang menyebabkan peningkatan emisi *greenhouse*

gas (GHG). RED mewajibkan seluruh negara anggota Uni Eropa untuk menggunakan paling tidak 10% kebutuhan bahan bakar di sektor transportasi dari energi hayati yang dapat diperbaharui termasuk di dalamnya biofuel, hidrogen, dan *green electricity* pada tahun 2020. Minyak kelapa sawit Indonesia diklasifikasikan sebagai minyak nabati yang tidak ramah lingkungan jika dikonversi sebagai biofuel atau biodiesel.

Begitu juga dengan *Indirect Land Use Change* (ILUC) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa pada tahun 2015 menganggap bahwa minyak kelapa sawit termasuk dalam kategori *high risk*. Diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit sangat terlihat jelas ketika Uni Eropa mengeksklusifkan minyak kedelai Amerika Serikat, walaupun menurut kriteria ILUC sendiri minyak kedelai memiliki tingkat deforestasi yang tinggi melebihi minyak kelapa sawit tetapi tidak tergolong dalam kategori *high risk*. Hambatan dari Uni Eropa ternyata bukan hanya datang dari pemerintahannya saja, tetapi juga berasal dari *Non-government Organization* (NGO) yang didalangi oleh Uni Eropa seperti Greenpeace, World Wide Fund, dan sejenisnya yang gencar menyuarakan tentang hak-hak lingkungan. Tekanan lebih intensif NGO global terhadap industri pengguna akhir (*end user*) minyak kelapa sawit antara lain dimulai dengan publikasi provokatif GreenPeace yang berjudul “*How the Industry Palm Oil is Cooking the Climate*” pada bulan November 2007. Hambatan tersebut ditujukan untuk menggiring perspektif masyarakat Uni Eropa agar berpandangan negatif pada minyak kelapa sawit.

Banyaknya hambatan yang ditujukan kepada minyak kelapa sawit Indonesia membuat Pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk mempertahankan minyak kelapa sawit di perdagangan internasional terutama di pasar Uni Eropa. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada Maret 2011 dalam Peraturan No.19/PERMENTAN/OT.140/3/2011 yang kemudian diperbarui menjadi No.11/PERMANTAN/OT.140/3/2015. Kebijakan ISPO bertujuan untuk membantu Indonesia untuk masuk kedalam pasar Uni Eropa yang memiliki prinsip berkelanjutan. Masih berhubungan dengan ISPO, Kementerian Pertanian kembali bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) bekerjasama membentuk *Sustainable Palm Oil Initiatives* (SPOI) pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2014 SPOI bersama *multi*

stakeholders meluncurkan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) atau The Indonesia Palm Oil Platform (InPOP).

FoKSBI ini dipergunakan untuk mengoordinasikan seluruh sektor dan faktor yang berkaitan dengan kelapa sawit yang ada saat ini dan juga untuk mempromosikan keberlanjutan dalam rantai pasokan minyak kelapa sawit nasional. Selain membentuk ISPO dan SPOI, Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya diplomasi dengan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Uni Eropa serta melakukan kunjungan-kunjungan ke negara-negara anggota Uni Eropa. Diplomasi tersebut dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki citra minyak kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa dengan memaparkan kebaikan-kebaikan minyak kelapa sawit dalam penggunaan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pemenuhan sumber energi. Pemerintah juga melayangkan berbagai macam protes berupa surat.

6.2 Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai upaya diplomasi ekonomi Indonesiaterhadap Uni Eropa untuk menyikapi proteksionisme terhadap minyak kelapa sawit Indonesia, penulis menyarankan Pemerintah Indonesia harus lebih aktif lagi dalam melakukan diplomasi ke Uni Eropa. Pemerintah Indonesia juga harus gencar mempromosikan mengenai keuntungan-keuntungan penggunaan minyak kelapa sawit bagi kehidupan Uni Eropa. Selain melakukan diplomasi, Pemerintah Indonesia juga harus benar-benar dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan yang sesuai standar global agar mudah memasuki pasar global terutama pasar Uni Eropa. Berikutnya Pemerintah Indonesia harus membaca pola hambatan Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit Indonesia agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menurunkan nilai perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global.

Dari beberapa saran tersebut, diharapkan pemerintah dapat terbantu untuk meningkatkan diplomasi ekonomi minyak kelapa sawit Indonesia. Dengan membaiknya industri kelapa sawit Indonesia akan berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi Indonesia dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.